

Kurang lebih 4,5 persen penduduk dunia berasal dari golongan masyarakat asli dimana 80 persen diantaranya hidup di Asia (Arnold & de Como, 2015). Masyarakat asli dalam konteks Indonesia cenderung di-identifikasikan sebagai masyarakat adat yaitu komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur di atas suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya melalui hukum dan kelembagaan adat (AMAN, dalam Bappenas, 2013). Populasinya diperkirakan mencapai 50 hingga 60 juta jiwa (AMAN, 2011).

Sebagai pewaris dan pemelihara budaya leluhur, masyarakat asli memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik, terlebih di tengah tren global yang mengarah kepada homogenitas budaya. Tradisi masyarakat asli yang bernuansa otentik dianggap eksotik dan mampu menciptakan nilai tambah bagi sektor pariwisata (Gang, 2011). Sementara dari aspek lingkungan hidup, masyarakat asli memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Mereka bertindak sebagai penjaga alam (custodian) untuk kemudian mewariskannya kepada generasi berikutnya. Memelihara keanekaragaman hayati bukan semata cara hidup, tetapi juga bagian dari budaya dan ekspresi spiritualitas mereka. Menurut perkiraan, 80 persen dari keanekaragaman hayati dunia dan 11 persen dari luasan hutan di muka bumi berada dalam teritorial dan penjagaan masyarakat adat (World Bank, 2008). Kearifan lokal yang dimiliki oleh hampir setiap masyarakat asli dalam mengatur hubungan mereka dengan alam semakin diakui dunia sebagai model konservasi yang efektif, terlebih dalam konteks strategi adaptasi manusia terhadap perubahan iklim.

Buku ini memberikan gambaran tentang resiliensi sosial komunitas betang di ensaid panjang terhadap perubahan sosial-ekologi.



Yayasan Barcode

ISBN 978-623-285-424-6



RESILIENSI SOSIAL KOMUNITAS BETANG DI ENSAID PANJANG TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-EKOLOGI



Dr. Drs. Markus, M.Si

# RESILIENSI SOSIAL

KOMUNITAS BETANG DI ENSAID PANJANG  
TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-EKOLOGI



**Dr. Drs. Markus, M.Si**

**RESILIENSI SOSIAL**  
**KOMUNITAS BETANG DI ENSAID PANJANG**  
**TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-EKOLOGI**

**PENERBIT YAYASAN BARCODE**  
**2021**

# **RESILIENSI SOSIAL**

## **KOMUNITAS BETANG DI ENSAID PANJANG TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-EKOLOGI**

**Penulis :**  
Dr. Drs. Markus, M.Si

ISBN : 978-623-285-424-6

**Design Cover & Layout:**  
Sulaiman Sahabuddin

Cetakan pertama : 2021

14x21 cm  
Diterbitkan pertama kali oleh:  
**YAYASAN BARCODE**

Divisi Publikasi dan Penelitian  
Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang  
Kecamatan Makassar Kota Makassar  
Email: [penerbitbarcode@gmail.com](mailto:penerbitbarcode@gmail.com)  
Website : [www.yayasanbarcode.com](http://www.yayasanbarcode.com)  
HP. 0853-4039-1342

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara  
apapun tanpa ijin penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan buku yang berjudul “resiliensi sosial komunitas betang di ensaid panjang terhadap perubahan sosial-ekologi” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini memberikan gambaran tentang resiliensi sosial komunitas betang di ensaid panjang terhadap perubahan sosial-ekologi. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Penyusun juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Dengan lapang dada dan kerendahan hati penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki buku ini.

Januari 2021

Penyusun

**Daftar isi**  
**(diisi setelah naskah diACC kan)**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kurang lebih 4,5 persen penduduk dunia berasal dari golongan masyarakat asli dimana 80 persen diantaranya hidup di Asia (Arnold & de Como, 2015). Masyarakat asli dalam konteks Indonesia cenderung di-identifikasikan sebagai masyarakat adat yaitu komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur di atas suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya melalui hukum dan kelembagaan adat (AMAN, dalam Bappenas, 2013). Populasinya diperkirakan mencapai 50 hingga 60 juta jiwa (AMAN, 2011).

Sebagai pewaris dan pemelihara budaya leluhur, masyarakat asli memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik, terlebih di tengah tren global yang mengarah kepada homogenitas budaya. Tradisi masyarakat asli yang bernuansa otentik dianggap eksotik dan mampu menciptakan nilai tambah bagi sektor pariwisata (Gang, 2011). Sementara dari aspek lingkungan hidup, masyarakat asli memberikan

kontribusi yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Mereka bertindak sebagai penjaga alam (*custodian*) untuk kemudian mewariskannya kepada generasi berikutnya. Memelihara keanekaragaman hayati bukan semata cara hidup, tetapi juga bagian dari budaya dan ekspresi spiritualitas mereka. Menurut perkiraan, 80 persen dari keanekaragaman hayati dunia dan 11 persen dari luasan hutan di muka bumi berada dalam teritorial dan penjagaan masyarakat adat (World Bank, 2008). Kearifan lokal yang dimiliki oleh hampir setiap masyarakat asli dalam mengatur hubungan mereka dengan alam semakin diakui dunia sebagai model konservasi yang efektif, terlebih dalam konteks strategi adaptasi manusia terhadap perubahan iklim.

Pada sisi yang lain, masyarakat asli di berbagai belahan dunia dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang menyedihkan. Berdirinya negara moderen yang kekuasaannya mencakup wilayah-wilayah dimana masyarakat asli bermukim telah membawa persoalan-persoalan tertentu. Pada umumnya masyarakat asli dalam sistem negara moderen (*nation-state*) termarginalkan oleh kepentingan negara dan isu-isu mereka cenderung direduksi pada persoalan asimilasi, integrasi, peradaban dan modernisasi (Champagne, Torjesen & Altamira, 2005). Hak-hak masyarakat asli juga sering



terancam oleh proyek-proyek pembangunan yang kian merambah wilayah-wilayah tradisional mereka. Dalam wacana pembangunan, masyarakat asli seakan-akan hanya berhak untuk “dibangun” (Berkes, Colding & Folke; 2003). Mereka cenderung tergusur dari bumi mereka sendiri dan tercerabut haknya atas sumber daya alam yang menjadi penopang hidup, budaya dan identitas mereka (Minority Rights Group International, 2012). Di Indonesia, antara 40 hingga 65 ribu penduduk yang hidupnya bergantung pada hutan tidak memiliki hak atas hutan dan lahan yang telah mereka kelola secara turun temurun (Michon et al., dalam Weihreter, 2014).

Komunitas Dayak Desa yang hidup di *betang* Ensaed Panjang sedikit banyak merepresentasikan fenomena umum di atas. Secara tradisional mereka hidup subsisten dan bergantung pada sumber daya alam. Gaya hidup agraris dimana hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka telah sedemikian rupa membentuk sistem budaya dan cara pandang mereka terhadap dunia (*worldview*). Hutan bagi mereka menjadi sumber pemenuhan kebutuhan material, kultural dan spiritual. Hukum adat, adat kebiasaan, dan sistem kepercayaan yang berkembang merupakan produk

dari proses interaksi mereka dengan alam yang terjadi dalam bentang waktu yang sangat panjang.

Akan tetapi dalam kurun waktu kurang lebih empat dasawarsa terakhir, komunitas *betang* Ensaid Panjang dihadapkan pada perubahan lingkungan sosial-ekologis yang tidak pernah mereka antisipasi sebelumnya, terutama karena perubahan itu ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah di bidang politik dan pembangunan dan penetrasi pasar. Politik transmigrasi dan *resettlement* pada jaman Orde Baru yang cenderung dipakai sebagai alat rekayasa sosial untuk mempercepat integrasi nasional tidak hanya merubah lanskap spasial, tetapi juga merubah lanskap sosial dan berdampak pada dinamika kehidupan komunitas *betang* hingga hari ini.

Pada sisi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang agraria turut membatasi ruang hidup komunitas *betang* terutama dalam mengakses hutan dan lahan. Klaim pemerintah atas hutan dan penetapan berbagai aturan mengenai peruntukan lahan dan pengaturan batas-batas administratif wilayah Desa hingga batas Dusun menyebabkan komunitas *betang* tidak lagi memiliki keleluasaan dalam mengakses lahan yang luas guna mempraktekkan ladang gilir balik menurut cara tradisional mereka. Sementara itu, investor

menguasai lahan yang begitu luas dan mengkonversikan hutan dan sebagian lahan adat menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Pada sisi lain pemerintah melalui program-program pembangunan terus berupaya mengubah perilaku masyarakat peladang. Ada anggapan bahwa metode berladang berpindah hanya menghasilkan tanah kritis dan lahan tidur yang dapat menyebabkan erosi tanah. Ditengah kontroversi itu, isu seputar kebakaran hutan dan lahan semakin memojokkan masyarakat peladang. Pada kisaran 2016-2017, sekitar 70 hektar lahan baik yang berupa semak belukar maupun *tembawang* dikonversikan menjadi lahan persawahan. Tujuannya agar pola menanam padi yang berpindah-pindah diubah menjadi menetap di satu lokasi sehingga mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar sekaligus untuk meningkatkan produksi padi.

Transformasi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia menempatkan Ensaid Panjang menjadi arena kontestasi beragam isu, mulai dari persolan akses kepada layanan dasar, hak atas tanah dan hutan serta pemanfaatannya, ketersediaan lapangan kerja alternatif, partisipasi dalam proses kebijakan hingga isu konservasi. Sementara itu, di tengah-tengah kompleksitas beragaam isu yang ada, cara

hidup tradisional komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang dihadapkan dengan apa yang dilabelkan sebagai “modernisasi”. Tekanan-tekanan terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka mengarah pada satu titik yang mengancam eksistensi mereka sebagai sebuah komunitas peladang.

Adaptasi komunitas dalam merespon perubahan sosial-ekologis dapat ditelaah melalui konsep resiliensi sosial. Resiliensi sosial adalah kemampuan komunitas dalam mengatasi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal seperti faktor politik, kebijakan, demografi, budaya, teknologi dan alam (Adger, 2000). Pendekatan ini berguna untuk memahami keputusan-keputusan komunitas dalam merespon tekanan eksternal pada sistem sosial mereka. Sebuah komunitas dikatakan resilien apabila mereka mampu menghadapi perubahan-perubahan secara positif tanpa kehilangan kompleksitas dan kemampuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Berbagai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki komunitas, baik yang bersifat material maupun sosial, dapat menjadi faktor penentu resiliensi komunitas.

## **BAB II**

# **KONSEP TENTANG SISTEM SOSIAL- EKOLOGI**

### **A. Komunitas sebagai Sistem Sosial**

Sistem sosial (*social system*) terbentuk ketika dua orang atau lebih memiliki tujuan atau orientasi yang sama dan saling berinteraksi dalam lingkup atau batasan lingkungan tertentu. Interaksi tersebut melahirkan tujuan-tujuan bersama dan melahirkan norma dan nilai bersama. Sistem sosial dapat dilihat dari berbagai tingkatan, mulai dari skala yang terkecil dan sederhana yaitu rumah tangga hingga pada tingkatan yang lebih besar dan kompleks yaitu komunitas, nasional, regional hingga dunia. Karena itu, cakupan, bentuk dan batasan sistem sosial-ekologi ditentukan oleh batasan permasalahan yang dirumuskan dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam Disertasi ini, sistem sosial-ekologi dibatasi pada skala komunitas.

Sistem sosial tidak hanya bersifat kompleks, melainkan juga adaptif (Missimer, Robert & Broman, 2016). Sistem sosial sistem dikatakan kompleks karena sistem sosial terbentuk dari jejaring hubungan-hubungan yang dinamis, dan

tidak dilihat sebagai agregat dari entitas-entitas yang statis. Sistem sosial disebut dinamis karena perilaku individu maupun kelompok yang ada di dalam sistem sosial bisa berubah (Castellani & Hafferty, 2010). Sebuah sistem yang kompleks dan adaptif dicirikan oleh perubahan dan ketidakpastian sehingga membutuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas (Berkes, Colding & Folke, 2003). Penelitian mengenai resiliensi sosial berupaya memahami dinamika sistem sosial yang kompleks dan adaptif tersebut (Missimer, Robert, Broman & Sverdrup, 2010).

Sistem sosial dikatakan memiliki daya lenting yang baik (resilien) apabila bersifat fleksibel, mampu beradaptasi, dan mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian (Marshall, et.al., 2013). Sebaliknya, suatu sistem dikatakan tidak lenting (tidak resilien) apabila sistem tersebut rentan terhadap perubahan-perubahan yang bersifat permanen dan mengancam sehingga bisa menyebabkan perubahan pada sistem, bahkan berubah ke arah yang tidak dikehendaki (Marshall, 2013).

## **B. Ketergantungan Sistem Sosial Manusia pada Ekosistem**

Konsep bahwa masyarakat manusia dan alam memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya bukanlah konsep yang baru. Kompleksitas dan pentingnya interaksi diantara dua komponen sosial dan ekologi mendorong para ilmuwan di bidang ilmu alam dan sosial untuk mengetahui lebih jauh interaksi diantara komponen-komponen itu guna mendapatkan pemahaman dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.

Manusia melalui sistem sosialnya berinteraksi dengan ekosistem disekitarnya, sehingga membentuk hubungan timbal balik yang sangat kompleks (Gambar 2.1.). Sistem sosial manusia dicirikan oleh besaran populasi, organisasi sosial di dalamnya, nilai-nilai, teknologi, kekayaan, pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. Tipologi komunitas menentukan sikap dan tindakan manusia terhadap ekosistem. Manusia memodifikasi alam guna mendapatkan manfaat dari alam (*ecosystem services*) untuk keperluan hidup manusia, seperti air, kayu, bahan makanan, energi, lahan untuk berladang, dan sebagainya.

Sistem sosial-ekologi adalah ekosistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem sosial. (Anderies, Janssen, & Ostrom, 2004). Tindakan

manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut sangat berpengaruh pada ekosistem. Sebaliknya, ekosistem seperti hutan, tanah, air, dan lain-lain yang berubah karena pengaruh manusia dapat kembali mempengaruhi kehidupan manusia (Harwood, 1996; Nair dan Kumar, 2006).

### **C. Ekosistem Hutan Kalimantan dan Sistem Sosial Masyarakat Dayak**

Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau dengan tingkat kekayaan hayati yang luar biasa di dunia. Kekayaan hayati Pulau Kalimantan tersimpan dalam hamparan hutan tropis dan berbagai ekosistem dan habitat yang ada dalam di Pulau Kalimantan. Terdapat beragam tipe ekosistem yang ada, mulai dari ekosistem pesisir, estuari, mangrove, hutan dataran rendah, rawa-rawa, lahan gambut dan ekosistem hutan dataran tinggi di daerah perbukitan. Ekosistem tersebut adalah tempat bagi preservasi berbagai kehidupan di pulau Kalimantan saat ini.

Besarnya keanekaragaman hayati pulau Kalimantan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain posisi pulau dalam zona tropik yang memungkinkan stabilitas iklim sepanjang tahun, sinar matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Posisi geografis pulau Kalimantan yang



memungkinkan terjadinya pencampuran flora, dan umur dari pulau Kalimantan yang sangat tua sehingga memungkinkan proses-proses spesiasi dan endemisme dapat terjadi dan menghasilkan anakaragam jenis-jenis flora-fauna Kalimantan. Sampai saat ini, bahkan jenis-jenis baru flora-fauna Kalimantan masih terus ditemukan dan menjadi koleksi baru dari keanekaragaman hayati Pulau Kalimantan.

Produk dan jasa lingkungan adalah manfaat yang disediakan oleh alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya melalui proses ekologis. Secara global, keanekaragaman hayati dan ekosistem Pulau Kalimantan menyumbangkan sumberdaya penting bagi kehidupan global, regional, nasional dan lokal, baik secara ekonomi, sosial-budaya dan jasa-jasa lingkungan (Mertz et al., 2009). Akan tetapi keberlanjutan dari produk dan jasa lingkungan tidak hanya ditentukan oleh ekosistem itu sendiri tetapi juga oleh tindakan manusia yang didorong oleh keinginan dan kebutuhan akan produk dan jasa dari ekosistem. Masyarakat yang mendiami kawasan berhutan dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya dan jasa yang diberikan oleh ekosistem hutan dalam hal ini dilihat sebagai sebuah sistem sosial. Aktivitas-aktivitas mereka berimplikasi pada dinamika ekosistem (Chapin, Folke & Kofinas, 2009).

Sebagai penduduk asli Kalimantan, masyarakat Dayak telah berinteraksi dengan hutan sejak dahulu kala. Ekosistem hutan dibentuk sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual mereka. Pemanfaatan hutan oleh komunitas masyarakat Dayak tidak terlepas dari pengalaman dan pengetahuan mereka yang terbentuk karena interaksi mereka dengan hutan dalam bentang waktu yang lama. Hal ini kemudian melahirkan sistem pengelolaan hutan, sistem perladangan, dan sistem budaya Dayak yang khas.

Proses-proses sosial memainkan peran penting untuk terjadinya perubahan-perubahan pada ekosistem hutan sehingga proses-proses sosial tersebut perlu dipahami sebagai faktor-faktor penentu keberlanjutan ekosistem. Proses-proses sosial juga dapat melahirkan resiliensi komunitas, atau bisa sebaliknya yakni kerentanan. Lebih jauh, kerentanan memiliki dimensi sosial dan cenderung dikaitkan dengan elemen-elemen kesejahteraan, terutama menyangkut sumber nafkah (*livelihood*), rasa aman (*safety*) dan kestabilan hubungan-hubungan sosial.

Sistem sosial tidak hanya bersifat kompleks, melainkan juga adaptif (Missimer, Robert & Broman, 2016). Sosial sistem dikatakan kompleks karena sistem sosial terbentuk dari jejaring hubungan-hubungan yang dinamis, dan

tidak dilihat sebagai agregat dari entitas-entitas yang statis. Sistem sosial disebut dinamis karena perilaku individu maupun kelompok yang ada di dalam sistem sosial bisa berubah (Castellani & Hafferty, 2010). Sebuah sistem yang kompleks dan adaptif dicirikan oleh perubahan dan ketidakpastian sehingga membutuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas (Berkes, et al, 2003). Penelitian mengenai resiliensi sosial berupaya memahami dinamika sistem sosial yang kompleks dan adaptif tersebut (Missimer, Robert & Broman, 2016).

Berbagai literatur menyatakan bahwa saat ini telah terjadi berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan komunitas Dayak di Kalimantan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh eksternal sangat kuat dan memberikan dampak dari tatanan kehidupan tradisional masyarakat Dayak. Sentuhan sosial-budaya yang terjadi antara masyarakat Dayak dengan komunitas dari luar telah terjadi sejak lama dan telah mempengaruhi kehidupan sosial-budaya dan religi masyarakat. Pada banyak hal, bahkan mempengaruhi aspek-aspek lingkungan dan spiritual yang telah ada.

Industrialisasi yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat Dayak dipercaya telah menyebabkan pergeseran

nilai-nilai sosial-budaya dan cara pandang dalam pemanfaatan alam Pulau Kalimantan. Secara historis, terdapat berbagai aktivitas yang menjadi faktor penting (eksternalitas) yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Dayak saat ini dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya lingkungan, antara lain adalah eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak bumi, penambangan batu bara, industri kayu, pembukaan kebun kelapa sawit dan penambangan emas. Memahami perubahan kondisi lingkungan adalah bagian dari memahami sistem sosial-ekologi.

# **BAB III**

## **KONSEP TENTANG RESILIENSI SOSIAL**

### **A. Batasan dan Ruang Lingkup Resiliensi Sosial**

Sistem sosial-ekologi dapat dimaknai sebagai dua sistem terpisah yang terdiri atas sistem manusia (*human system*) dan ekosistem (*ecological system*), namun keduanya saling berhubungan, dimana manusia menggantungkan hidupnya pada ekosistem dan ekosistem dipengaruhi oleh eksistensi manusia (Berkes et al., 2003). Studi tentang resiliensi dibangun berdasarkan gagasan bahwa sebuah fenomena harus dipahami sebagai suatu sistem sosial-ekologi yang berdinamika. Analisis tentang resiliensi dari sudut pandang sosial-ekologi memungkinkan kita memahami hubungan transaksional manusia-lingkungan.

Konsepsi mengenai resiliensi telah mengalami pergeseran penekanan dimana pada awalnya difokuskan pada persistensi fungsi ekosistem, kemudian bergeser menjadi sistem sosial-ekologis, dan selanjutnya difokuskan pada adaptasi manusia terhadap perubahan ekosistem atau yang dikenal dengan resiliensi sosial (Wilson, 2012). Ketika di-

identikkan dengan persistensi, resiliensi dimaknai sebagai kestabilan ekosistem dan kemampuannya mengabsorpsi perubahan dan gangguan dengan tetap mempertahankan struktur dan fungsinya (Crawfor Hollings, dalam Walker & Salt, 2006). Resiliensi dalam konteks ini diukur melalui besaran gangguan yang mampu ditoleransi oleh ekosistem agar tetap bertahan (Carpenter, *et. al.*, 2001). Namun setelah itu muncul definisi resiliensi fase kedua, yaitu resiliensi sosial-ekologis. Pada fase ini, resiliensi dimaknai sebagai kemampuan atau kapasitas sistem sosial-ekologi dalam mengabsorpsi gangguan dan me-reoganisir diri (beradaptasi) ketika terjadi perubahan sehingga struktur, karakteristik dan umpan balik dalam sistem sosial-ekologi tetap dipertahankan (Folke, 2006). Fase ini ditandai oleh minat peneliti pada isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Fase selanjutnya berangkat dari pemikiran bahwa masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Konsep resiliensi ini lebih diarahkan kepada sistem sosial manusia sebagai bagian dari sistem sosial-ekologi. Resiliensi dalam hal ini mencakup pula unsur transformabilitas dari suatu sistem sosial. Resiliensi sosial memberi penekanan pada upaya memahami bagaimana sistem sosial manusia merespon perubahan (Wilson, 2012). Berbeda dari gagasan

mengenai resiliensi ekologis (*ecological resilience*), wawasan untuk memahami resiliensi sosial banyak berasal dari ilmu-ilmu sosial.

Salah satu definisi pertama mengenai resiliensi sosial dibuat oleh Adger (2000) yang mengatakan bahwa resiliensi sosial adalah kemampuan sebuah kelompok atau komunitas dalam menghadapi berbagai tekanan atau gangguan yang berasal dari luar komunitas yang ditimbulkan oleh perubahan sosial, politik, dan lingkungan. Definisi yang dikemukakan oleh Adger tersebut menggarisbawahi bahwa konsep resiliensi sosial mempunyai kedekatan dengan konsep resiliensi ekologis yang dicirikan oleh adanya kemampuan untuk mempertahankan diri ketika terjadi gangguan. Sebagaimana dikemukakan oleh Adger, keterkaitan hubungan antara resiliensi sosial dan resiliensi ekologis nampak jelas terutama pada komunitas yang kehidupannya banyak bergantung pada sumberdaya alam dan lingkungan.

Konsepsi mengenai resiliensi sosial menekankan pada beberapa aspek. Pertama, resiliensi sosial harus dibicarakan dalam konteks perubahan, bukan keadaan yang statis (Zautra, Hall, & Murray, 2008). Perubahan yang dimaksud berupa “gangguan pada sistem”, sehingga ukuran gangguan relatif besar dan dapat menimbulkan krisis (Magis, 2010). Kedua,

mengkonsepsikan resiliensi perlu mempertimbangkan konteks yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perubahan mulai dari faktor alam hingga perubahan yang dibuat oleh manusia (Zautra, Hall, & Murray, 2008). Ketiga, mengkonsepsikan resiliensi perlu merujuk kepada faktor-faktor yang dapat menimbulkan resiliensi yaitu modal-modal seperti modal sosial, modal ekonomi, alam, kultural kapital (Roberts & Townsend, 2015).

Selain ketiga hal di atas, hal-hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa resiliensi sosial terdiri atas tiga komponen kapabilitas, yaitu: 1) kemampuan mengatasi (*coping capacity*), 2) daya adaptif (*adaptive capacity*), dan 3) kemampuan bertransformasi (*transforming capacity*) (Bene, et.al, 2012). *Coping capacity* menyangkut kemampuan komunitas mengatasi ancaman-ancaman yang terjadi dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia. *Coping capacity* lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat taktis jangka pendek. Sementara *adaptive capacity* menyangkut langkah-langkah proaktif atau preventif yang dilakukan oleh komunitas berdasarkan pengalaman masa lalu untuk menghindari peristiwa yang tidak di inginkan terjadi di kemudian hari. Kemampuan berdaptasi diperlukan untuk menyasati dampak perubahan-perubahan. Selanjutnya,

---



*transforming capacity* menyangkut kemampuan komunitas mengakses aset-aset dan bantuan dari arena sosio-politik yang lebih luas, seperti organisasi pemerintah dan masyarakat luas, agar dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan dan memperkokoh komunitas.

## **B. Kerentanan dan Adaptabilitas Komunitas**

Agar dapat menjelaskan apa yang terjadi pada komunitas ketika perubahan sosial-ekologis berlangsung, maka perlu juga dipahami seberapa rentan sebuah komunitas ketika dihadapkan dengan perubahan. Karena itu, upaya mengetahui resiliensi sosial komunitas juga harus memahami kerentanan sosial komunitas, dan sebaliknya. Upaya mendeskripsikan resiliensi sosial komunitas akan kehilangan konteksnya apabila tidak dilengkapi dengan upaya memahami kerentanan sosial mereka. Selanjutnya, upaya mendeskripsikan resiliensi dan kerentanan sosial komunitas tidak banyak bermanfaat bila tidak diikuti dengan upaya memahami kemampuan komunitas beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Kerentanan cenderung menggambarkan ketidakmampuan komunitas menghadapi fenomena ketidakstabilan yang timbul karena faktor alam maupun

manusia (Cardona, 2006). Kerentanan adalah keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan komunitas dalam menghadapi tekanan-tekanan yang berasal dari perubahan lingkungan dan perubahan sosial karena tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk beradaptasi (Adger 2006). Kerentanan sosial disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor fisik, sosial dan lingkungan yang menyebabkan kelompok sosial atau komunitas mudah terkena dampak negatif dari perubahan. Kerentanan sosial juga bisa disebabkan oleh ketidaksetaraan di dalam masyarakat (Enarson, Fothergill & Lori, 2006).

Dari perspektif adaptasi komunitas, perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi pada suatu komunitas bisa berbeda-beda efeknya bagi setiap individu atau kelompok di dalam komunitas. Sehingga, setiap orang akan merespon dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Kemampuan beradaptasi (*adaptive capacity*) sering ditempatkan sebagai komponen dari resiliensi yang merefleksikan kapasitas komunitas untuk belajar.

### C. Model Analisis Resiliensi Sosial pada Komunitas yang Bergantung pada Hutan

Komunitas yang bergantung pada hutan atau sumber daya alam digambarkan sebagai sebuah sistem sosial yang berada di dalam sistem-sistem yang lebih besar dan selalu berada di bawah pengaruh kekuatan eksternal yang memicu terjadinya perubahan (Akamani, 2012). Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.2., faktor-faktor yang mendorong perubahan bisa ditimbulkan oleh dinamika budaya, politik dan kebijakan, demografi, ekonomi, teknologi atau alam. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif, dan kekuatan, intensitas, frekuensi maupun besaran dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing faktor tidak sama (Cutter *et. al.*, 2008). Sebaliknya, perubahan yang terjadi di dalam komunitas dapat pula mempengaruhi faktor-faktor eksternal tadi.

Ketika dihadapkan dengan faktor-faktor eksternal, komunitas akan merespon dengan cara-cara yang berbeda-beda, yang disebut sebagai strategi adaptasi (*adaptation strategies*). Strategi adaptasi merupakan proses dimana komunitas menerapkan strategi *coping*, *adapting* dan *transformating*. Proses dalam melakukan *coping*, adaptif dan transformatif bisa saja berbeda-beda bentuknya mulai dari

tindakan kolektif pada level komunitas, level rumah tangga dan level individu.

Komunitas memiliki sejumlah aset yaitu berbagai sumber daya atau modal-modal (*capitals*) berupa modal sosial, modal alam, modal ekonomi, modal fisik, dan modal manusia yang menggambarkan dimensi kesejahteraan sekaligus menggambarkan kapasitas komunitas dalam merespon perubahan-perubahan (Donoghue & Sturtevant, 2007). Modal alam adalah sumber daya biofisik yang menyediakan produk dan jasa lingkungan guna mendukung kehidupan komunitas secara berkelanjutan dan dinilai berdasarkan ketersediaannya dan akses komunitas.

Modal manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan hal-hal lain yang memungkinkan individu maupun rumah tangga bisa membuat keputusan-keputusan yang baik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif guna meningkatkan kesejahteraan komunitas. Modal sosial mencakup norma-norma dan jejaring-jejaring yang bersifat resiprokal antar individu dan antar kelompok yang diwarnai oleh rasa saling percaya sehingga mendorong terjalinnya kerjasama diantara individu maupun dalam kelompok. Modal sosial yang baik memungkinkan terjadinya keputusan-

keputusan dan tindakan-tindakan kolektif dalam merespon perubahan eksternal.

Modal fisik mencakup segala bentuk infrastruktur yang mendukung kesejahteraan semua orang di dalam komunitas tersebut. Komunitas dapat mengakses berbagai kebutuhan seperti air bersih, transportasi, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan sebagainya melalui infrastruktur tersebut. Modal ekonomi merupakan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan atau sumber-sumber penghidupan lainnya yang dapat menambah kesejahteraan mereka. Aset komunitas berupa modal-modal di atas juga terdistribusikan dalam skala rumah tangga.

Selain aset (sumber daya), institusi/lembaga dan organisasi juga memiliki peran penting bagi komunitas dalam merespon perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal. Lembaga dalam hal ini adalah sistem pengaturan yang membentuk interaksi sosial, sedangkan organisasi adalah kelompok-kelompok yang beranggotakan individu-individu yang dipersatukan oleh keinginan dan tujuan bersama. Lembaga dan organisasi dalam komunitas bisa berbeda-beda bentuk dan tipenya, misalnya lembaga dan organisasi yang berbasis pasar, berbasis komunitas, atau

terpusat. Selain itu, lembaga dan organisasi dalam komunitas bisa berada pada level atau skala yang berbeda, dimana ada hubungan vertikal dan/atau horisontal diantara institusi atau organisasi yang ada di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Akses kepada institusi tentu saja akan meningkatkan akses untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang penting lainnya.

Anggota-anggota komunitas yang kaya akan sumber daya, berafiliasi dengan berbagai organisasi dan sangat merasakan dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal akan mengelompok dalam rangka merespon kekuatiran bersama. Pada sisi lain, apabila terjadi penurunan kapasitas dan modal-modal komunitas sebagaimana disebutkan di atas, maka yang terjadi adalah mal-adaptasi atau kerentanan.

#### **D. Domain-Domain dalam Analisis Resiliensi Sosial**

Upaya memahami resiliensi sosial pada tingkat komunitas diarahkan pada ruang lingkup resiliensi komunitas, cara menilai resiliensi dan bagaimana membangun resiliensi komunitas. Resiliensi komunitas merujuk kepada kepemilikan sumber-sumber daya, kemampuan mengembangkan dan memanfaatkannya untuk menyiasati perubahan kondisi

lingkungan hidup yang dicirikan oleh ketidakpastian dan sulit diprediksi sehingga kehidupan komunitas bisa bertahan (Kelly, *et. al.*, 2015). Guna memahami tingkat resiliensi komunitas, khususnya pada komunitas yang bergantung pada sumber daya alam seperti hutan, Kelly *et. al.* (2015) membagi resiliensi kedalam 5 aspek atau domain, yaitu: ekonomi, sosial, politik/institusi, kultural dan alam.

**Domain ekonomi** dianggap sebagai faktor yang menentukan, baik terhadap resiliensi maupun kerentanan sosial komunitas. Penelitian yang menghubungkan resiliensi komunitas dengan degradasi lahan pertanian pada sistem sosial-ekologi berbasis hutan dan semak belukar, Kelly *et. al.* (2015) menjelaskan bahwa faktor ekonomi erat kaitannya dengan proses degradasi lahan. Faktor ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya degradasi lahan, atau sebaliknya dapat juga mejadi faktor yang bisa dikaitkan dengan usaha positif komunitas dalam merespon degradasi lahan (Kelly, *et. al.*, 2015). Terlibatnya komunitas lokal ke kedalam pengaruh kekuatan pasar kapitalis global juga sering mendorong para pemangku kepentingan untuk mengintensifkan penggunaan lahan (Kelly, *et. al.*, 2015). Ketiadaan sumber penghasilan dan sumber penghidupan alternatif dapat mendorong komunitas

mengintensifkan penggunaan lahan sehingga memperburuk kondisi tanah.

**Domain sosial** sangat krusial bagi terwujudnya resiliensi sosial dimana fungsinya menengahi kekuatan tarik-menarik antara komponen sosio-ekonomi dan komponen lingkungan di dalam sistem sosial-ekologi. Pemanfaatan lahan atau sumberdaya lainnya tidak lepas dari agenda-agenda pribadi dan tujuan-tujuan yang berimplikasi ekonomi di dalamnya. Faktor sosial dalam hal ini mencakup tingkat interaksi diantara anggota komunitas yang di dalamnya ada rasa saling percaya (*trust*), hubungan sosial, resolusi konflik, komunikasi dan pembelajaran, kohesivitas, dan sebagainya (Magis, 2010). Pada komunitas yang modal sosialnya lemah, ada kecenderungan tidak adanya kepedulian komunitas terhadap aktivitas yang bisa merusak lahan dan hutan sehingga pemangku kepentingan yang punya kekuatan akan dengan mudah menaklukkan komunitas karena adanya perpecahan diantara mereka (Bodin & Crona, 2008).

Domain ketiga adalah **domain institusi**. Faktor-faktor politik memiliki keterkaitan dengan ideologi dan *worldview* yang dominan dari para pembuat keputusan, baik di tingkat lokal, regional maupun pusat (nasional), terutama menyangkut ada tidaknya pengakuan bahwa degradasi lahan



dan hutan adalah masalah dalam tataran kebijakan dan apakah ada mekanisme yang mengkompensasi kerugian masyarakat yang terkena dampak (Juntti and Wilson, 2005). Sehingga hal yang paling pokok yaitu adanya kemauan politik dan kemampuan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam menangani degradasi lahan lahan atau hutan.

Domain ke-empat adalah **domain kultural** yang meliputi norma-norma masyarakat, kaidah-kaidah, tradisi, ritual dan ideologi. Elemen-elemen kultural dapat dilihat sebagai ide-ide yang meresap di dalam kehidupan komunitas sehingga menjadi kesadaran kolektif. Ideologi-ideologi yang berkembang di dalam masyarakat yang terbentuk melalui nilai-nilai kepercayaan dan nilai-nilai moral secara langsung mampu mempengaruhi resiliensi komunitas. Faktor-faktor kultural dapat menjadi indikator penting guna guna mengetahui kebanggaan komunitas akan nilai-nilai tradisional dan adat (Stump, 2010).

Domain yang terakhir yaitu **domain alam**, dimana resiliensi komunitas memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor alam. Jenis dan kualitas tanah, ketersediaan dan kualitas air, kecuraman dan akses menuju ke sebuah lokasi, kerentanan sebuah lokasi terhadap dampak perubahan cuaca

misalnya kekeringan merupakan aspek-aspek alam yang dapat mempengaruhi resiliensi komunitas (Basso *et. al.*, 2010).

Berdasarkan kelima domain di atas, komunitas dikatakan resilien apabila domain sosial, ekonomi, budaya, politik/institusi dan alam di dalam komunitas tersebut dikembangkan secara baik (Emery & Flora, 2006; Kelly *et. al.*, 2015). Apabila salah satu atau beberapa dari kelima domain tersebut lemah, maka komunitas tersebut dikategorikan sebagai komunitas yang rentan (Wilson, 2012). Buikstra *et. al.* (2010) dan Wilson (2012) menekankan bahwa hal yang sangat penting untuk mengetahui resiliensi komunitas adalah memahami keterkaitan dan hubungan timbal balik diantara domain-domain yang ada di dalam sistem sosial-ekologi tersebut.

## **E. Resiliensi Sosial dan Penguatan Kapasitas Komunitas**

Resiliensi sosial adalah tentang adaptasi komunitas, termasuk di dalamnya adalah upaya membangun kapasitas manusia untuk menyikapi perubahan, sehingga dapat mengelola perubahan-perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang diperlukan oleh komunitas. Sebuah komunitas dikatakan resilien apabila mereka mampu menghadapi perubahan-perubahan yang tidak mereka antisipasi

sebelumnya tanpa kehilangan kompleksitas dan kemampuan yang telah mereka miliki sebelumnya.

Konsep lain yang sangat dekat dengan konsep resiliensi sosial bahkan sering disilihkan adalah *community capacity* (kapasitas komunitas). *Community capacity* sendiri didefinisikan sebagai interaksi diantara berbagai kapital seperti kapital manusia, sumberdaya komunitas dan kapital sosial yang dimiliki komunitas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan bersama dan meningkatkan kesejahteraan (Magis, 2010). Resiliensi sosial dalam hal ini lebih mengarah kepada sistem sosial dalam konteks perubahan. Resiliensi sosial dan kapasitas komunitas jelas memiliki hubungan yang erat, dimana resiliensi sosial sangat bergantung pada kapasitas komunitas (Magis, 2010).

Pemberdayaan dan resiliensi dalam komunitas memiliki keterkaitan dengan kapasitas dan jenis-jenis kapital yang dimiliki komunitas. Kapasitas dapat diartikan sebagai seluruh daya, baik yang dimiliki secara individu maupun secara kolektif, yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas (Fischer & McKee, 2017). Komponen-komponen yang menentukan kapasitas komunitas antara lain kemampuan kelompok, keterampilan, pengetahuan, sumber daya, kepemimpinan, partisipasi,

norma dan rasa saling percaya, jejaring sosial, perasaan sebagai bagian dari komunitas (termasuk bagian dari historis dan nilai-nilai komunitas), transparansi, refleksi kritis dan daya atau kekuatan komunitas (Goodman, dalam Fischer & McKee, 2017). Unsur-unsur di atas menjadi basis kekuatan komunitas dalam mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi dan bertindak ke arah perubahan yang positif.

Membangun kapasitas komunitas semakin dianggap perlu dalam upaya pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan umumnya upaya membangun kapasitas dilihat dalam konteks ketidakberdayaan komunitas. Chaskin (2001) mendefinisikan kapasitas komunitas sebagai interaksi diantara modal manusia (*human capital*), sumberdaya organisasi (*organizational resources*) dan modal sosial (*social capital*) yang ada di dalam komunitas tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Sementara Matarrita-Cascante et. al. (2017) mendefinisikan kapasitas komunitas sebagai proses dimana warga komunitas, lembaga-lembaga *for-profit* dan *non-profit* dan institusi pemerintah yang berminat dalam pengembangan masyarakat bekerja bersama-sama untuk memperkuat sumber daya lokal dan memobilisasi

sumber-sumber daya, baik lokal maupun dari luar komunitas, guna menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi komunitas.

## **BAB IV**

# **PERUBAHAN LANSKAP TRADISIONAL DALAM KONTEKS SOSIAL-EKOLOGI KOMUNITAS BETANG DI ENSAID PANJANG**

Interaksi komunitas lokal dengan ekosistem di sekeliling mereka telah menciptakan suatu hubungan ketergantungan antara komunitas dan ekosistem. Pada komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang, besarnya ketergantungan kepada ekosistem, khususnya hutan, dapat dilihat dari besarnya peran ekosistem hutan dalam tatanan sosial, ekonomi, spiritual dan budaya komunitas. Dari sisi ekonomi, hutan telah berperan sebagai jaringan pengaman dengan menyediakan berbagai material yang untuk tujuan subsisten maupun komersial, dan menjadi basis bagi sistem perladangan berpindah. Hutan juga memberikan fungsi-fungsi non-material, yakni fungsi sosial, kultural dan spiritual.

Elemen-elemen kehidupan komunitas Dayak Desa seperti budaya bermukim, pola produksi, organisasi sosial hingga sistem nilai dan sistem kepercayaan orang Dayak Desa sangat kuat menonjolkan jalinan mereka dengan ekosistem

hutan dan elemen-elemen tersebut bertemu dan menyatu dalam konsep betang. Hampir seluruh aktivitas penting, baik aktivitas produktif, sosial, budaya maupun ritual, dilangsungkan di betang. Betang adalah personifikasi dari aspek-aspek kosmologis yang tidak terlihat, struktur yang dibentuk secara ritual (Sather, 1993). Betang adalah jantungnya orang dayak, tempat hidup bagi nilai-nilai budaya Dayak.

Bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi komunitas di lokasi studi adalah berladang. Berladang memiliki dimensi sosial, budaya dan spiritual dimana di dalamnya terdapat ritual dan penghormatan kepada sang Pencipta, para leluhur dan alam melalui ritual-ritual khusus. Spiritualitas orang Dayak Desa juga diekspresikan dalam tahapan-tahapan berladang. Bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus perladangan orang Dayak Desa di lokasi studi adalah tata cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Komunitas Dayak di lokasi studi memiliki pengetahuan yang baik tentang hutan dan secara tradisional telah mempraktekkan sistem perladangan gilir balik yang ramah lingkungan dengan menerapkan masa bera yang panjang pada lahan-lahan bekas ladang.

Arsitektur tradisional merupakan identitas budaya suatu suku bangsa, di dalamnya terkandung segenap peri kehidupan masyarakatnya. Betang, dalam hal ini, bukan semata bangunan fisik melainkan juga perwujudan dari filosofi dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas yang menghuninya. Filosofi hidup komunitas Dayak Desa di lokasi studi dapat di telusuri dari pemaknaan mereka terhadap betang, bahwa betang adalah ruang-ruang kehidupan yang tersusun secara vertikal dan horisontal. Betang Ensaïd Panjang dalam konteks ini adalah sebuah ungkapan simbolik sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Freeman terhadap makna betang bagi suku Dayak Iban (Freeman,1958). Akan tetapi, sebagaimana teridentifikasi pada rumah betang Ensaïd, betang juga adalah *setting* dimana ritual-ritual penting dilakukan. Betang melalui elemen-elemen fisik adalah personifikasi dari aspek-aspek kosmologis yang tidak terlihat. Betang dalam konteks ini adalah struktur yang dibentuk secara ritual (Sather, 1993).

Batang sesungguhnya adalah sebuah organisasi sosial suku Dayak, di dalamnya terdapat sebuah sistem sosial yang fungsional. Komunitas Betang Ensaïd dalam hal ini adalah representasi dari sistem sosial masyarakat Dayak Desa pada tatanan mikro. Rumah betang sebagai sebuah sistem sosial



ditandai oleh kehidupan sehari-hari di dalam betang yang penuh dengan keteraturan karena ada norma dan sistem nilai yang mengatur interaksi diantara penghuninya. Kepribadian, tingkah laku, sikap, perbuatan, dan aktivitas sosial dan ekonomi para penghuni betang dibimbing oleh norma adat dan selalu dihubungkan dengan sistem kepercayaan tradisional mereka (Coomans 1997). Konsep betang yang masih tradisional biasanya memiliki seorang kepala rumah tangga atau juru piara (*pun rumah*), tetua adat, *semanang* (penyembuh penyakit) dan administrator kampung (*kebayan*). Hidup bersama dalam satu kesatuan komunitas dapat langgeng karena adanya kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mengatur relasi sosial warga komunitas, termasuk relasi mereka dengan alam sekitar. Nilai-nilai kolektif yang tumbuh dan diperlukan untuk keberlangsungan hidup bersama terpelihara melalui mekanisme hukum adat dan seperangkat aturan *mali* (tabu) yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota komunitas dalam bertindak dan berperilaku.

Kondisi lahan pertanian yang sebagian besar merupakan lahan kering dan kurang subur tidak memungkinkan untuk diolah kedalam dua atau tiga kali penanaman dalam satu tahun. Guna meningkatkan kesuburan tanah, maka pembersihan lahan dengan cara membakar

menjadi opsi dalam rangka mengatasi kondisi tanah Kalimantan yang kurang mineral dan nutrisi. Pembakaran dimaksudkan untuk mempercepat proses dekomposisi material organik yang menjadi sumber nutrisi bagi tanah (Crevello, 2004).

Sebaliknya, Kleinman et al. (dalam Weihere, 2014) berpendapat bahwa sistem pertanian berladang berpindah dalam skala kecil justru dapat dilihat sebagai praktek pertanian yang berkelanjutan karena tidak bergantung pada input dari luar seperti pupuk kimia, pestisida dan irigasi yang memiliki ketergantungan pada energi fosil.

Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan lokal dan tradisi tidak bersifat statis (Ellen et al, dalam Crevello, 2004). Menanam biji karet di ladang bersama-sama dengan padi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional akan menciptakan sistem agroforestri yang kompleks yang disebut hutan karet (*jungle rubber*). Sistem agroforestri tradisional diakui mampu berfungsi sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) yang stabil di sekitar hutan konservasi (Lawrence, 1996).

Komunitas adat di rumah *betang* Ensaid Panjang memiliki apa yang diutarakan oleh Valene Smith (dalam Timothy, 2011) sebagai komunitas dengan empat H, yaitu: *habitats, heritages, histories* dan *handicrafts*. *Habitat*

---

mencakup kesatuan komunitas beserta sistem ekologis yang menjadi wadah bagi kebudayaan mereka untuk tumbuh dan bertahan dimana *betang* menjadi pusatnya. Sementara *heritage* dalam konteks ini mencakup pengetahuan, keterampilan, bahasa, sistem kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, norma dan sebagainya beserta cara hidup yang menjadikan suku Dayak Desa di Ensaed Panjang sebagai sebuah kelompok etnik. *Histories* bertalian dengan kehidupan masa lampau dan juga mencakup ketersentuhan masyarakat asli dengan dunia luar (modernisasi). Sedangkan *handicrafts* mencakup karya seni dan produk-produk buatan tangan yang diproduksi melalui metode tradisional.

## **BAB V**

# **TEKANAN EKSTERNAL PADA SISTEM SOSIAL-EKOLOGI KOMUNITAS BETANG**

Karakteristik yang dimiliki komunitas betang di Ensaid Panjang menunjukkan bahwa komunitas tersebut tergolong sebagai masyarakat perdesaan. Umumnya masyarakat perdesaan di berbagai belahan dunia sedang, bahkan telah, mengalami perubahan-perubahan besar. Pada komunitas betang Ensaid Panjang, perubahan-perubahan tersebut mengarah pada transisi dari masyarakat yang sangat tergantung pada sumber daya hutan menuju suatu kondisi dimana ketergantungan komunitas pada hutan diminimalisir. Transisi ini disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari luar komunitas yang dapat di-identifikasikan sebagai kekuatan negara dan pasar. Kekuatan-kekuatan eksternal tersebut berdampak besar pada perubahan lingkungan sebagaimana terindikasikan dari perubahan lanskap, perubahan pola pemanfaatan lahan, perubahan demografis dan terjadinya diversifikasi ekonomi.

Sebagai negara berpenduduk besar yang terdiri atas beragam suku bangsa dan tersebar dalam bentang geografis yang sangat luas, prioritas kebijakan pembangunan politik Indonesia adalah menyatukan berbagai komponen bangsa yang berbeda-beda. Keragaman budaya dalam konteks ini sering dilihat sebagai faktor penghambat integrasi nasional sehingga perlu diperlemah. Pada saat yang sama, Jawa sebagai kelompok mayoritas khususnya dalam struktur kekuasaan di Indonesia cenderung mendominasi proses rekonstruksi identitas kebangsaan Indonesia selama ini sehingga kebudayaan nasional cenderung di-identikan dengan kebudayaan Jawa (Elmhirst, 2000). Karena itu memindahkan orang-orang Jawa ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa melalui program transmigrasi menjadi opsi untuk mempercepat proses integrasi nasional tersebut.

Keinginan pemerintah untuk mengoreksi ketimpangan jumlah penduduk antara Pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa juga menjadi faktor dilihat yang mendorong pemerintah memindahkan penduduk ke luar Jawa. Selain itu, program transmigrasi juga dilihat sebagai cara pemerintah menarik orang-orang asli (*indigenous*) yang dianggap menghuni hutan secara liar dan menarik para pekerja sektor informal yang dinilai hidup secara tidak layak di kota untuk kemudian

diarahkan pada sistem pertanian kapitalis yang berorientasi ekspor (Elmhirst, 2000). Sebagaimana yang terjadi pada program transmigrasi di Ensaid Panjang dan tempat-tempat lain di luar Ensaid Panjang, program transmigrasi diarahkan pada tanaman non-pangan. Pemerintah kala itu memfokuskan pada tanaman karet yang *booming* di pasar global.

Kebijakan transmigrasi di Era Orde Baru tersebut tidak hanya mengubah lingkungan fisik dimana masyarakat asli bermukim, tetapi juga mengubah komposisi penduduk sehingga berdampak secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Di wilayah Desa Ensaid Panjang saja, tidak kurang dari 300 hektar lahan dilakukan *land clearance*. Sebagian besar wilayah yang digunakan untuk menampung transmigrasi adalah lahan berhutan sekunder yang diklaim oleh komunitas lokal sebagai wilayah adat. Di dalamnya terdapat lahan bekas ladang yang sedang dalam masa bera (*pemudak*), agroforestri (*tembawang*) dan sebagian hutan sekunder yang siap dijadikan ladang. Gaya hidup para transmigran juga memberi ide-ide baru kepada komunitas lokal. Dalam hal bercocok tanam, orang lokal mulai mengenai pupuk dan racun serta alat-alat pertanian memberi sedikit modifikasi pada metode bercocok tanam tradisional mereka.

Tekanan pada penghidupan komunitas betang juga berasal dari pasar. Penetrasi kapitalisme dan globalisasi kedalam sektor pertanian mengakibatkan pola produksi yang bersifat subsisten bertransformasi menjadi pola produksi pertanian yang menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan pasar (Thongyou, 2014). Tidak jarang proses transformasi itu harus dibayar dengan hilangnya hutan. Untuk membuka perkebunan kelapa sawit, lahan-lahan berhutan dikonversikan menjadi perkebunan sawit yang monokultur dalam skala luas hingga menimbulkan deforestasi yang masif (Bou Dib, Krishna, Alamsyah & Qaim, 2018; Susanti & Maryudi, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa selain kerusakan ekologis, keberadaan perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan dampak negatif bagi komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada ekosistem. Alokasi lahan perkebunan kelapa sawit tidak jarang tumpang tindih dengan tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat asli (Prabowo, Maryudi, Senawi, Imron, 2017). Selain itu, masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak akan menghilangkan sistem agroforestri masyarakat lokal (Pye, 2018). Hal-hal tersebut juga terjadi pada komunitas Dayak Desa di Ensaed Panjang. Masuknya perusahaan perkebunan Kelapa Sawit telah membuat mereka

kehilangan hutan dan lahan dalam skala luas. Hutan dan lahan tersebut merupakan cadangan untuk tempat berladang bagi mereka dan bagi komunitas-komunitas Dayak lainnya yang hidup di sekitar hutan, dan di dalamnya terdapat tembawang-tembawang.

Kebijakan negara dan berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan negara banyak yang membatasi bahkan melarang masyarakat asli mengakses atau menggunakan sumber daya alam, termasuk hutan. Penetapan bukit Rentap sebagai hutan lindung telah menjadikan areal berhutan seluas 750 hektar di bukit rentap sebagai hutan milik negara. Sejak keputusan itu efektif, masyarakat diancam dengan sanksi apabila membuka ladang dan mengambil kayu di areal hutan lindung tersebut. Sementara pohon karet lokal yang sudah lebih dahulu ada hanya boleh diambil getahnya sebagai hasil hutan bukan kayu, namun masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan peremajaan.

Pada kenyataannya praktek perladangan berpindah tidak dianjurkan oleh pemerintah. Banyak pihak, termasuk pemerintah, beranggapan bahwa berladang berpindah merusak ekosistem hutan dan menyebabkan terjadinya degradasi tanah (Myers, 1992; Angelsen, 1995). Namun bila dibandingkan dengan pemanfaatan hutan untuk kepentingan



industri oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat Dayak masih dalam skala yang relatif kecil. Perusahaan kayu (*logging*) dan perusahaan perkebunan terutama sawit dan tanaman industri lainnya memiliki andil yang jauh lebih besar dalam penghilangan hutan (Potter dan Li, dalam de Jong et al, 2001). Para migran dari luar pulau Kalimantan yang membuka lahan untuk menanam berbagai komoditas pertanian guna mendapatkan hasil besar (*high-yielding crops*) tanpa memberi kesempatan kepada lahan untuk menghidupkan kembali (*fallow period*) juga membawa dampak negatif yang besar terhadap kondisi tanah (Dove, 1985).

Berbagai tekanan di atas mengarah pada satu titik penting dalam penghidupan komunitas, yaitu sistem perladangan. Menurunnya akses kepada hutan dan lahan adalah faktor utama yang memaksa komunitas Dayak Desa untuk tidak lagi menerapkan perladangan menurut cara-cara tradisional. Dalam kurun waktu sekitar tiga dasa warsa terakhir, sistem perladangan yang menerapkan rotasi dan masa bera yang panjang semakin sulit diterapkan. Bahkan tekanan pada praktek perladangan berpindah komunitas Dayak Desa di Ensaed Panjang secara gradual telah membawa

sistem bercocok tanam tradisional tersebut semakin dekat kepada titik kepunahan.

Beberapa studi terhadulu menunjukkan bahwa fenomena kepunahan sistem perladangan berpindah terjadi secara cepat. Guo, et. al. (2002) mengungkapkan bahwa mulai dari pegunungan di Propinsi Yunnan, China, hingga daerah pedalaman Kalimantan menunjukkan fenomena menghilangnya praktek perladangan. Padoch, et. al. (1998) memperkuat temuan itu melalui kajian terhadap masyarakat peladang di Tae, Kabupaten Sanggau yang mendiami kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tekanan pada masyarakat peladang di Tae menurut Padoch berasal dari pemerintah dan perusahaan agar lahan-lahan dikonversikan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Situasi serupa juga ditemui pada komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang. Meskipun masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat peladang, intensitas praktek perladangan mereka sudah mengalami penurunan yang signifikan.

## **BAB VI**

# **RESILIENSI KOMUNITAS BETANG TERHADAP TEKANAN EKSTERNAL**

### *1) Coping Capacity*

Salah satu strategi adaptasi yang diadopsi oleh komunitas di lokasi studi adalah strategi *coping*, yaitu strategi yang bersifat reaktif dan dikaitkan dengan upaya mempertahankan *status quo* sehingga komunitas cenderung bersikap resisten terhadap perubahan (Jordan, 2015). Pada komunitas betang di Ensaed Panjang, fenomena ini termanifestasikan melalui upaya komunitas untuk mempertahankan praktek berladang meskipun bersawah dilihat sebagai salah satu jalan keluar bagi keterbatasan lahan. Strategi *coping* melalui berladang lebih banyak didorong oleh keputusan untuk mempertahankan budaya, mempertahankan nilai-nilai spiritual dan identitas komunitas karena di dalam tradisi berladang terdapat tradisi memelihara benih dan ritual *Nyelapat Taon*.

Selain karena alasan tersebut di atas, warga yang masih mempraktekkan perladangan adalah warga yang sulit mengakses lahan basah untuk bersawah. Lokasi lahan basah

terkonsentrasi di sekitar kaki bukit Rentap dan tidak semua warga memiliki lahan di tempat itu. Sementara infrastruktur berupa irigasi belum berfungsi. Sebagian warga juga mempertahankan cara bercocok tanam di ladang karena adanya preferensi untuk mengkonsumsi padi organik dan sayur-sayuran hasil ladang yang memiliki citarasa yang lebih enak dibandingkan dengan hasil bersawah. Keinginan untuk menggarap lahan yang berisi karet kampung (lokal) yang sudah tidak produktif menjadi ladang terlebih dahulu sebelum dikonversikan menjadi kebun karet monokultur adalah tujuan jangka pendek yang menyebabkan berladang masih bertahan meskipun dalam masa transisi.

Selain berladang, bentuk strategi *coping* lainnya adalah menenun. Sebagaimana yang terjadi pada aktivitas berladang, praktek menenun lebih banyak didorong oleh tujuan ekonomi jangka pendek. Kebutuhan akan uang (*cash*) telah mendorong komunitas Dayak Desa di lokasi studi untuk menggeluti tenun ikat sebagai bentuk diversifikasi ekonomi. Tenun dalam hal ini menjadi komoditi yang bersifat komplementer bagi sumber-sumber lain untuk menghasilkan uang, dan pada sisi lain tenun dikaitkan dengan upaya komunitas mempertahankan identitas dan budaya.

Beberapa pendapat (Dercon & Krishanan, 1996; Ellis, 2000; Unni, 1996) menyimpulkan bahwa sumber-sumber penghidupan masyarakat pedesaan tidak bisa lagi terbatas pada sumber-sumber tradisional seperti bercocok tanam, berburu, memungut hasil hutan, berladang atau yang lainnya, melainkan harus melakukan diversifikasi dengan cara menggabungkan berbagai jenis pekerjaan atau sumber nafkah. Studi kasus di India, misalnya, mengungkapkan bahwa mata pencaharian para petani kecil yang berbasis lahan semakin tidak menunjukkan berkelanjutan karena hasil lahan yang mereka garap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup, termasuk untuk menghidupi ternak-ternak mereka (Heremath, 2007). Akibatnya, banyak keluarga terpaksa mencari sumber penghasilan alternatif. Perlunya diversifikasi oleh komunitas pedesaan dengan latar pertanian disebabkan oleh dua alasan: pertama karena pemasukan yang hanya berasal dari satu sumber saja tidak mencukupi; kedua, untuk meminimalisir resiko apabila sumber yang diandalkan menemui kegagalan (Sunderlin & Angelsen, 2005).

Pilihan komunitas untuk mempertahankan berladang dan menjadikan kain tenun ikat sebagai strategi adaptasi dimungkinkan karena eksistensi modal sosial, khususnya *bonding social capital* dan *cultural capital* yang masih kuat.

Kedua modal tersebut secara bersama-sama termanifestasikan melalui keinginan komunitas sebagai kolektivitas untuk tetap merayakan *Nyelapat Taon* yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi berladang. Modal lain adalah ketersediaan lahan berladang meskipun sudah dalam kategori hutan sekunder muda dan tidak ideal namun masih memungkinkan sebagian warga komunitas untuk mempraktekan berladang. Sementara untuk kain tenun, intervensi *stakeholder* luar untuk menghidupkan kembali kain tenun yang sudah pernah punah dan membuka pasar bagi hasil kerajinan kain tenun mengindikasikan bahwa komunitas memiliki *bridging social capital*.

Keputusan-keputusan komunitas dalam menentukan strategi adaptasi ketika berdinamika dengan perubahan selalu membawa dampak dan resiko tertentu. Selain menjanjikan sebagai salah satu sumber penghasilan alternatif, menenun juga membawa dampak-dampak yang tidak diinginkan. Kegiatan menenun membawa para penenun kedalam pusaran ekonomi pasar. Mekanisme pasar, dimana aspek distribusi, selera pasar, daya beli, kelangkaan dan sebagainya, menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada hasil yang diperoleh dari kain tenun. Selain itu, kegiatan menenun menciptakan

persaingan diantara para penenun dalam merebut pembeli yang berpotensi mengganggu kohesi sosial komunitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka *coping capacity* hanya mengantarkan komunitas pada stabilitas yang relatif sehingga dapat dikatakan sebagai strategi yang non-adaptif untuk jangka panjang. Ketika dihadapkan dengan tekanan perubahan, *coping capacity* sangat menentukan apakah komunitas dapat mencapai *adaptive capacity* atau sebaliknya menjadi rentan (Adger, 2000).

## 2) *Adaptive Capacity*

Adaptasi komunitas dapat dihubungkan dengan kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) yang mencakup tindakan-tindakan komunitas yang bersifat preventif berdasarkan pengalaman masa lalu guna menghadapi dampak atau gangguan yang terprediksi. *Adaptive capacity* bersifat proaktif dan jangka panjang (Tinch, et. al., 2015). Pada kasus komunitas betang di Ensaid Panjang, strategi yang tergolong adaptif yaitu adopsi sistem bersawah guna menyiasati kelangkaan lahan dan hambatan yang semakin terasa ketika mengolah lahan pertanian dengan cara berladang. Kelangkaan lahan adalah ancaman yang bersifat permanen yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk (faktor demografis) yang cenderung semakin meningkat sehingga perlu

diantisipasi jika pada suatu titik tertentu di masa mendatang lahan perladangan tidak tersedia sama sekali (*furure event*).

Ketika sistem bersawah masuk ke dalam lingkungan komunitas, dengan cepat teknologi bersawah diadopsi oleh komunitas dan disandingkan dengan sistem bercocok tanam berladang, bahkan semakin banyak warga yang betul-betul sudah menggantikan berladang dengan bersawah. Kemampuan komunitas mengintegrasikan sawah kedalam basis ketahanan pangan dalam kurun waktu yang relatif cepat mengindikasikan bahwa komunitas setempat memiliki kemampuan untuk belajar, dan hal ini dilihat sebagai salah satu karekteristik penting dari sistem sosial yang adaptif.

Kapasitas komunitas dalam beradaptasi dicapai dari hasil interaksi berbagai kapital seperti modal manusia, modal sosial dan berbagai sumber daya lain yang bisa diakses oleh komunitas guna mengatasi kesulitan bersama dan meningkatkan kesejahteraan (Magis, 2010). Pada komunitas di Ensaïd, beberapa modal yang saling berinteraksi sehingga memungkinkan bersawah relatif berhasil antara lain adalah: 1) modal alam, 2) modal sosial, dan 3) modal budaya. Modal fisik dalam bersawah adalah ketersediaan lahan basah yang memungkinkan praktek bersawah bisa berhasil. Sementara beberapa bentuk modal sosial yang menentukan keputusan



komunitas untuk bersawah adalah: 1) *linking social capital*, dan 2) *bridging social capital*. Masuknya program cetak sawah dan bantuan-bantuan melalui kelompok tani membuktikan bahwa komunitas juga memiliki *linking social capital* yang baik, yakni bentuk modal sosial yang menghubungkan komunitas dengan *stakeholder* di luar komunitas. *Bridging social capital* nampak dalam cara komunitas mengorganisasikan aktivitas bersawah dimana peran kepala dusun dan pemimpin adat sangat menentukan dalam membentuk dan mengatur hubungan di dalam kelompok-kelompok tani sawah.

Modal budaya turut berperan dalam keputusan komunitas memilih bersawah sebagai strategi adaptasi, yaitu kedudukan padi yang memiliki akar budaya yang kuat di dalam komunitas yakni sebagai tanaman yang dianggap sakral dan telah menjadi sumber ketahanan pangan yang utama sejak bergenerasi silam. Modal budaya juga dapat ditelusuri melalui sistem bercocok tanam di lahan basah (*uma payak*) yang sudah lama dikenal komunitas sebelum sistem bersawah yang lebih moderen diperkenalkan kepada komunitas.

Demikian halnya dengan transisi dari menanam karet lokal yang terintegrasi kedalam sistem perladangan ke sistem perkebunan yang intensif (monokultur), juga dapat

dikategorikan sebagai bentuk dari *adaptive capacity*. Bagi komunitas di wilayah studi, kebun karet adalah bentuk pengakuan atas kepemilikan lahan, sehingga menanam karet memiliki dua tujuan, yaitu: 1) untuk mempertahankan aset (tanah), dan 2) untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang.

Karet bukanlah komoditas baru karena karet sudah sejak lama terintegrasi dalam sistem agroforestri mereka. Sistem agroforestri komunitas lokal tersebut erat kaitannya dengan perladangan berpindah karena menanam katet biasanya dilakukan pasca berladang. Varietas karet yang ditanam dalam sistem agroforestri mereka adalah jenis karet lokal, atau sering disebut karet kampung. Meskipun karet kampung tersebut disadap untuk tujuan komersil, pengusahaannya tidak intensif.

Seiring semakin besarnya ketergantungan keluarga pada uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan semakin sulitnya memperoleh hasil hutan untuk dijual dan semakin sulitnya mempraktekkan ladang karena keterbatasan lahan, maka karet dilihat sebagai komoditas yang menjanjikan. Bagi komunitas di Ensaid Panjang, komoditas karet bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat, terlebih bila pengusahaannya dilakukan secara intensif dengan menanam

karet jenis unggul (*Hevea brasiliensis*) dan perlakukan khusus dengan input-input dari luar berupa pupuk, racun rumput, racun semak, racun kayu dan racun gulma.

Keinginan untuk memiliki kebun karet unggul yang lebih luas telah mendorong terjadinya konversi lahan-lahan bekas ladang yang sudah menjadi hutan karet campuran tua (*rubber forest*) untuk dijadikan lahan karet monokultur. Biasanya lahan yang berisi pohon-poin karet lokal yang sudah berumur tua dijadikan ladang untuk terakhir kalinya sebelum kemudian dijadikan lahan perkebunan karet monokultur. Kecenderungan yang terjadi adalah lahan-lahan yang sudah digunakan untuk berladang tidak lagi dibiarkan memasuki masa bera melainkan langsung dikonversikan menjadi tanaman karet. Masuknya lembaga keuangan non-bank *Credit Union* (CU) yang memberi fasilitas kredit dan penyuluhan-penyuluhan mengenai tata cara bertanam karet unggul turut mendorong percepatan konversi lahan menjadi kebun-kebun karet monokultur.

Akan tetapi masuknya sitem bersawah yang lebih modern bukan tanpa dampak negatif. Setelah diperkenalkan dengan teknologi bersawah, komunitas setempat kini akrab dengan berbagai jenis pupuk dan pestisida, termasuk bibit-bibit padi yang berasal dari luar komunitas. Penggunaan

input-input dari luar tersebut mampu meningkatkan produktivitas sawah. Berbeda dari sistem pengerjaan ladang yang berbasis pola *bedurug*, sistem pengerjaan sawah lebih banyak mengandalkan tenaga kerja dari keluarga inti. Pelibatan orang lain biasanya berbasis upah harian, dan hal ini menciptakan lapangan kerja bagi warga yang membutuhkan pekerjaan.

Transisi dari pengusaha karet lokal (kampung) ke karet unggul tidak hanya persoalan menggantikan jenis karet melainkan terjadinya perubahan pola hubungan sosial. Penelitian yang dilakukan Harrington (2015) pada komunitas Dayak Siang di Kabupaten Murung, Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa transisi dari berladang berpindah ke perkebunan karet menyebabkan hilangnya sistem bercocok tanam tradisional dan terjadinya perubahan pola hubungan sosial. Sistem kerja kolektif melalui konsep gotong-royong yang identik dengan ladang kini tidak ditemukan dalam pengerjaan kebun karet. Harrington menekankan bahwa integrasi komunitas lokal kedalam sistem ekonomi pasar telah melahirkan dominasi individu dan hilangnya budaya gotong-royong.

Pada komunitas betang Ensaed Panjang, fenomena di atas sudah mulai nampak. Bersamaan dengan transisi dari

berladang ke bersawah dan berkebun karet adalah hilangnya ritual-ritual berladang yang merupakan bagian dari identitas komunitas. Sistem kerja *bedurug* yang begitu khas dalam sistem perladangan mereka sudah mulai digantikan dengan sistem kerja berbasis upah. Bersamaan dengan transisi dari berladang ke berkebun karet dan mudarnya praktek *bedurug*, ladang-ladang pun tidak lagi luas karena keterbatasan tenaga kerja. Kondisi ini memicu pemilik lahan untuk menggeluti sawah dan berkebun karet.

### 3) *Transformative Capacity*

Diluar kapasitas *coping* dan *adaptive*, terdapat resiliensi sosial yang dikaitkan dengan kapasitas transformatif (*transformative capacity*), yaitu kemampuan komunitas dalam mengubah sebagian besar dari struktur atau sistem dimana mereka hidup sehingga berakibat pada perubahan yang relatif radikal pada sistem atau struktur sosial yang ada. Resiliensi yang bersifat transformatif menekankan bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari sehingga sistemlah yang harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru.

Suatu sistem sosial (komunitas) dimungkinkan untuk memiliki ketiga elemen kapasitas tersebut (*coping*, *adapting* dan *transformating*) pada tingkatan yang berbeda-beda, namun para ilmuwan beranggapan bahwa perimbangan

diantara ketiga elemen tersebut diperlukan agar suatu komunitas dapat resilien ketika dihadapkan dengan tekanan eksternal (Keck dan Sakdapolrak, 2013). Beberapa penelitian empiris pada komunitas agraris menyimpulkan bahwa penekanan yang terlalu besar pada aspek *coping* akan akan membatasi komunitas tersebut dalam berinovasi dan merespon perubahan yang akan menguntungkan mereka.

*Transformative capacity* adalah kemampuan sistem sosial komunitas menciptakan sistem baru (Folke, 2006). *Transformative capacity* masih belum nampak pada komunitas betang di Ensaed Panjang. Beberapa karakteristik yang sangat kasat mata dapat dijadikan petunjuk bahwa komunitas betang belum pada tahap transformatif, antara lain gaya hidup agraris yang masih melekat pada komunitas dan pola bermukim yang masih tradisional yaitu di betang. Komunitas di wilayah studi dapat dikatakan telah mencapai *transformative capacity* apabila ciri-ciri tradisional tersebut sudah hilang karena struktur sosial komunitas sudah berubah secara total.

Pada komunitas yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan sumber daya alam, strategi keberlanjutan hidup (*livelihood strategies*) yang memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian masih sangat diperlukan. Namun

demikian, diversifikasi mata pencaharian di luar sektor itu juga perlu dilakukan melalui berbagai bentuk aktivitas, seperti produksi skala kecil untuk kebutuhan pasar atau menjadi pekerja, baik di sektor pertanian maupun pada bidang-bidang di luar sektor pertanian. Dalam hal ini, kombinasi dari aktivitas yang terkait dengan bercocok tanam maupun yang tidak terkait dengan bercocok tanam (*on farm, non-farm dan off-farm*) dapat dijadikan strategi yang efektif untuk keberlangsungan hidup.

Meskipun latar belakang komunitas di India di atas tidak sama dengan latar belakang komunitas di Ensaid Panjang, kemiripan diantara kedua komunitas terletak pada perlunya diversifikasi sumber penghasilan untuk menunjang sektor pertanian. Diversifikasi yang dilakukan oleh komunitas Dayak Desa di Ensaid yaitu memproduksi kain tenun. Artefak yang bernilai secara budaya dan spiritual kini dijadikan komoditas yang bisa diperjual-belikan. Kebutuhan akan uang telah mendorong komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang untuk menggeluti tenun ikat selain menyadap karet dan bercocok tanam. Kain tenun dalam hal ini menjadi komoditas yang bersifat komplementer.

Strategi keberlanjutan hidup yang ditempuh komunitas, baik kolektif maupun level rumah tangga, sangat

tergantung pada pilihan-pilihan yang tersedia, dalam hal ini kemampuan dan sumber daya (material maupun sosial) yang mereka miliki dan aksi-aksi yang mereka lakukan. Modal-modal tersebut merupakan “aset” yang akan menjadi basis untuk membangun resiliensi sosial mereka. Sebaliknya, hambatan bagi komunitas untuk melakukan diversifikasi juga disebabkan oleh lemahnya basis aset yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Hal ini dicontohkan dari komunitas di Burdwan District di Bengali Barat (Khatun dan Roy, 2012), dimana lemahnya basis aset telah berdampak pada rendahnya kapasitas komunitas khususnya pada tingkat rumah tangga untuk melakukan diversifikasi. Di sana banyak keluarga yang hanya memiliki bidang lahan yang kecil dan hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ketiadaan akses kepada fasilitas pinjaman (kredit), meskipun mereka sudah mendapatkan pelatihan keterampilan baik yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, menyebabkan warga sulit memulai usaha kecil. Selain itu, minimnya infrastruktur seperti jalan dan telekomunikasi telah menghambat warga untuk menjual produk-produk lokal.

Fenomena serupa terjadi pada komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang, dimana sebagian warga kini cenderung



menempatkan sawah sebagai sumber utama untuk memperoleh padi dan ketergantungan yang tinggi pada tanaman penghasil uang, dalam hal ini karet, sejalan dengan hasil penelitian hasil penelitian Padoch (1998) terhadap perilaku berladang komunitas Tae di Kabupaten Sanggau, Indonesia. Padoch mengungkapkan bahwa meskipun komunitas Tae saat masih mempraktekkan perladangan berpindah, skalanya cenderung semakin mengecil. Pada sisi lain, ketergantungan komunitas Tae pada perladangan berpindah kini beralih kepada sistem bercocok tanam secara menetap di sawah dan tanaman karet.

## **BAB VII**

# **MENEMUKAN PROPOSISI TENTANG RESILIENSI SOSIAL**

Strauss dan Corbin (1990) mendorong perlunya para peneliti memiliki sensitivitas terhadap kondisi, interaksi dan konsekuensi dari fenomena yang diteliti dan menata kondisi dan konsekuensi dari fenomena tersebut kedalam proposisi atau hipotesa. *Grounded theory* adalah upaya menemukan proposisi dari data kualitatif, atau dengan kata lain suatu proses untuk melakukan teorisasi data. Proposisi dalam penelitian ini adalah penjelasan teoritik atas fenomena yang berkaitan dengan resiliensi sosial komunitas betang terhadap perubahan sosial ekologis, khususnya pada aspek *coping capacity*, *adaptive capacity* dan *transformative capacity*.

Proses menemukan proposisi dalam penelitian ini ditempuh melalui tahapan-tahapan. Pertama, melakukan transkripsi data berdasarkan rekaman wawancara dan catatan lapangan dari hasil observasi untuk menghasilkan data dalam bentuk teks. Kedua, proses *coding* (pengkodean) yaitu mengkategorisasikan segemen-segmen dalam data dengan memberi nama singkat guna merepresentasikan bagian-bagian

dari data. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data menggunakan tabel. Berdasarkan kategorisasi data akan didapat klaster data yang merepresentasikan fenomena, dimana fenomena-fenomena yang muncul dikelompoknya kedalam satu klaster. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pola dan variabel yang akan menjadi komponen pembentuk proposisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abesamis, N., Corrigan, C., Drew, M., Campbell, S., & Samonte, G. 2006. Social resilience: A literature review on building resilience into human marine communities in and around MPA networks. *Social and Economic Resources*, 5, 1-41.
- Adger, W.N. 2000. Social and ecological resilience: are they related? *Progress in Human Geography* 24(3): 347-364.
- Adger, W.N., 2006. Vulnerability. *Global Environ. Change* 16, 268–281.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006>.
- Akamani, K. 2012. A community resilience model for understanding and assessing the sustainability of forest-dependent communities. *Human Ecology Review*, Vol. 19, No. 2, 2012
- Anderies, J. M., Janssen, M. A., and E. Ostrom. 2004. A framework to analyze the robustness of social-ecological systems from an institutional perspective. *Ecology and Society* 9(1): 18.

- Arnold, M & de Como, S. 2015. *Building social resilience, protecting those most at risk*. Washington, D.C: The World Bank.
- Ashkenazy, A., et al. 2017. Operationalising resilience in farms and rural regions e Findings from fourteen case studies, *Journal of Rural Studies* (2017), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.07.008>
- Bappenas, 2013. Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Basso, B., De Simone, L., Ferrara, A., Cammarano, D., Cafiero, G., Yeh, M.-L., Chou, T.-Y.,2010. Analysis of contributing factors to desertification and mitigation measuresin Basilicata Region. *Ital. J. Agron.* 5, 33–44.
- Béné, C., R. G. Wood, A. Newsham, and M. Davies. 2012. *Resilience: New Utopia or New Tyranny? Reflection about the Potentials and Limits of the Concepts of Resilience in Relation to Vulnerability Reduction Programs*. Working Paper 405. Brighton, UK: Institute for Development Studies.

- Berkes, F. and D. Jolly. 2001. Adapting to climate change: social-ecological resilience in a Canadian western Arctic community. *Conservation Ecology* 5(2): 18. [online] URL: <http://www.consecol.org/vol5/iss2/art18/>
- Berkes, Colding dan Folke (Eds). 2003. *Navigating social – ecological systems, Building resilience for complexity and change*. UK: Cambridge Univeristy Press.
- Bingeman, K., Berkes, F., dan Gardner J.S. 2004. Institutional responses to development pressures: resilience of social–ecological systems in Himachal Pradesh, India. *Int J Sust Dev World Ecol* 11:99–115
- Bodin, O., dan B. Crona. 2008. “Management of Natural Resources at the Community Level: Exploring the Role of Social Capital and Leadership in a Rural Fishing Community.” *World Development* 36 (12): 2763–2779.
- Bou Dib, J., Krishna, V., Alamsyah, Z. & Qaim, M. 2018. Land-use change and livelihoods of non-farm households: The role of income from employment in oil palm and rubber in rural Indonesia. Goettingen University, EFForTS Discussion Paper Series 21.
- Buikstra, E., et.al. 2010. The components of resilience: perceptions of an Australian rural com-munity. *J. Community Psychol.* 38, 975–991.
-

- Cardona, O.D. 2006. The need for rethinking the concepts of vulnerability and risk from a holistic perspective: a necessary review and criticism for effective risk management. Dalam: Bankoff G, Freks G, Hilhorst D. (eds.) Mapping vulnerability: disasters, development and people. London: Earthscan.
- Carpenter, S.; Walker, B.; Anderies, J. M. and Abel, N. 2001. From metaphor to measurement: resilience of what to what? In: Ecosystems 4, 765–781. DOI: 10.1007/s10021-001-0045-9
- Castellani, B., Hafferty, F.W., 2010. Sociology and Complexity Science: A New Field of Inquiry. Springer, Berlin/Heidelberg, Germany.
- Champagne, Torjesen dan Altamira. (2005). *Rethinking Native Relations with Contemporary Nation-States* dalam *Indigenous People and Modern State*. California: Altamira Press
- Chapin, F.S., Kofinas, F.S., dan Folke, C., (Eds). 2009. Principles of Ecosystem Stewardship: Resilience-Based Natural Resource Management in a Changing World. Springer-Verlag
- Coomans, M. 1997. *Manusia Daya, Dahulu Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Crevello, S. 2004. *Dayak land use systems and indigenous knowledge*. *Journal of Human Ecology*, 16:1, 69-73, DOI: 10.1080/09709274.2004.11905718
- Cutter, S. L., *et al.* 2008. A place based model for understanding community resilience to natural disasters. *Global Environmental Change*, 18(4), 598-606.
- de Jong, W., *et al.* 2001. *Farming secondary forests in Indonesia*. *Journal of Tropical Forest Science* 13(4): 705-726)
- Donoghue, M. E., & Sturtevant, V. E. 2007. Social science constructs in ecosystem assessment: Revisiting community capacity and community resilience. *Society and Natural Resources*, 20(10), 899-912.
- Dove, M. 1985. *Swidden agriculture in Indonesia: The Subsistence Strategies of the Kalimantan Kantu'*. Mouton Publishers: Berlin, New York, Amsterdam.
- Elmhirst, R. 2000. A Javanese diaspora? Gender and identity politics in Indonesia's transmigration resettlement program. *Women Studies International Forum*, Vol. 23, No. 4, pp.487-500.
- Emery, M., Flora, C., 2006. *Spiraling-up: mapping community transformation with community capitals*



- framework. *Community Dev.* 37, 19e35.  
<http://dx.doi.org/10.1080/15575330609490152>.
- Enarson E, Fothergill A, Lohri P. 2006. Gender and disaster: foundations and directions. Dalam: Rodriguez H, Quarantelli EL, Dynes RR. (eds.). *Handbook of disaster research*. Springer. hal. 130-146.
- Fischer, A. & McKee ,A. 2017. A question of capacities? Community resilience and empowerment between assets, abilities and relationships. *Journal of Rural Studies* 54 (2017) 187e197
- Folke, C. 2006. Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change* **16**:253-267.
- Freeman, J.D. 1958. The family system of the Iban of Borneo. *Cambridge Papers in Social Anthropology* 1: 15-52.
- Guo, H., Padoch, C., Coffey, K., Aiguo, C. & Yongneng, F. 2002. Economic development, land use and biodiversity change in the tropical mountains of Xishuangbanna, Yunnan, Southwest China. *Environmental Science & Policy* 5: 471-479.
- Jordan, J.C. 2015. Swimming alone? The role of social capital in enhancing local resilience to climate stress: a case

- study from Bangladesh, *Climate and Development*, 7:2, 110-123, DOI:10.1080/17565529.2014.934771
- Juntti, M. dan Wilson, G.A. 2005. Conceptualising desertification in Southern Europe: stakeholder interpretations and multiple policy agendas. *Eur. Environ.* 15, 228–249.
- Keck, M., and P. Sakdapolrak. 2013. “What Is Social Resilience? Lessons Learned and the Way Forward.” *Erdkunde* 67 (1): 5–19.
- Kelly C., et. al. 2015. Community resilience and land degradation in forest and shrubland socio-ecological systems: evidence from Gorgoglione, Basilicata, Italy. *Land Use Pol.* 46, 11–20.
- Maessen, J. 2014. *Tenun ikat Dayak Desa: Cerita dan motif kain*. DEKRANAS (Dewan Kerajinan Nasional) and Yayasan Kobus.
- Magis, K. 2010. Community Resilience: An Indicator of Social Sustainability. *Society & Natural Resources: An International Journal*, 23(5), 401 - 416.
- Marshall, N.A., R.C. Tobin, M. Gooch, A. Hobday, and P.A. Marshall. 2013. Social vulnerability of marine resource users to extreme weather events. *Ecosystems*. DOI: 10.1007/s10021-10013-19651-10026.
-

- Matarrita-Cascante, D. et al. 2017. Conceptualizing community resilience: Revisiting conceptual distinctions, *Community Development*, 48:1, 105-123, DOI: 10.1080/15575330.2016.1248458
- Mertz, O., et al., 2009. Swidden change in Southeast Asia: Understanding causes and consequences. *Hum Ecol* (2009) 37:259–26. DOI 10.1007/s10745-009-9245-2
- Miles, M.B., Huberman, A.M. dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. SAGE Publications: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, DC.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook* (2nd. Ed). London: Sage.
- Missimer, M., Robèrt K – H., Broman G. & Sverdrup, H. 2010. Exploring the possibility of a systematic and generic approach to social sustainability. *Journal of Cleaner Production*. 18(10-11): 107-1112.
- Mulyoutami, E., van Noordwijk, M., Sakuntaladewi, N. & Agus, F. 2010. Perubahan Pola Perladangan: Pergeseran persepsi mengenai para peladang di Indonesia. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office

- Obrist, B., Pfeiffer, C. and Henley, R. 2010. Multi-layered social resilience: a new approach in mitigation research. Dalam: *Progress in Development Studies* 10 (4), 283–293. DOI: 10.1177/146499340901000402
- Padoch, C., Harwell, E. & Susanto, A. 1998. Swidden, sawah, and in-between: agricultural transformation in Borneo. *Human Ecology* 26: 3-20.
- Panpakdee, C., & Limnirankul, B. 2017. Indicators for assessing social-ecological resilience: A case study of organic rice production in northern Thailand, *Kasetsart Journal of Social Sciences*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.kjss.2017.07.003>.
- Prabowo, D., Maryudi, A., Senawai, Imron, M.A. 2017. Conversion of forests into oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights from actors' power and its dynamics. *Forest Policy and Economics* 78 (2017) 32–39
- Pye, O. 2018. Commodifying sustainability: Development, nature and politics in the palm oil industry. *World Development* (2018), <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.014>
- Rescia, A.J., *et. al.* 2010. Changes in land uses and management in two Nature Reserves in Spain:

- Evaluating the social–ecological resilience of cultural landscapes. *Landscape and Urban Planning* 98 (2010) 26–35
- Sather, C. 1993. “Posts, hearths and thresholds; The Iban longhouse as a ritual structure”, in: James J. Fox (ed.), *Inside Austronesian houses; Perspectives on domestic designs for living*, pp. 65-115. Canberra: Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.
- Schoon, M., C. Fabricus, J. M. Anderies, and M. Nelson. 2011. Synthesis: Vulnerability, traps, and transformations-Long-term perspectives from archaeology. *Ecology and Society* 16
- Stump, D., 2010. ‘Ancient and backward or long-lived and sustainable?’ The role of the past in debates concerning rural livelihoods and resource conservation in Eastern Africa. *World Dev.* 38 (9), 1251–1262.
- Susanti, A. & Maryudi, A. 2016. Development narratives, notions of forest crisis, and boom of oil palm plantations in Indonesia. *Forest Policy and Economics* 73 (2016) 130–139.
- Timothy, D., Dallen J. 2011. *Cultural Heritage and Tourism: An Introduction* UK: Channel View Publications
-

- Thongyou, M. 2014. Rubber Cash Crop and Changes in Livelihoods Strategies in a Village in Northeastern Thailand. *Asian Social Science*; Vol. 10, No. 13; 2014, ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025
- Tinch, Rob & Jäger, J & Omann, Ines & A. Harrison, P & Wesely, Julia & Dunford, Robert. 2015. Applying a capitals framework to measuring coping and adaptive capacity in integrated assessment models. *Climatic Change*. 128. 323-337. 10.1007/s10584-014-1299-5.
- Walker, B.H., Salt, D., 2006. *Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World*. Island Press, Washington (D.C.).
- Weihreter E. 2014. *Traditional knowledge, perceptions and forest conditions in a Dayak Mentebah community, West Kalimantan, Indonesia*. Working Paper 146. CIFOR: Bogor, Indonesia.
- Wilson, G.A., 2012. *Community Resilience and Environmental Transitions*. Routledge/Earthscan, London.
- Wilson, G.A., Schermer dan M., Stotten, R., 2018. The resilience and vulnerability of remote mountain communities: the case of Vent, Austrian Alps. *Land Use Pol.* 71, 372–383.

Wilson, G.A., Hu, Z., dan Rahman, S. 2018. Community resilience in rural China: The case of Hu Village, Sichuan Province. *Journal of Rural Studies* 60 (2018) 130–140

World Bank. 2018. <http://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples>

Zautra, A., Hall, J., & Murray, K. 2008. Community development and community resilience: An integrative approach. *Community Development*, 39, 130–147. doi:10.1016/j.landusepol.2012.07.011

